

MENINGKATKAN KINERJA SISTEM RESI GUDANG DI INDONESIA

IMPROVING THE PERFORMANCE OF WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM IN INDONESIA

Dini Septia A. M. , Syarif I. Hidayat, Setyo Parsudi

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gn. Anyar, Kota Surabaya, Kode pos . 60294

Email : dinsepmurti123@gmail.com

Abstrak

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu solusi dalam manajemen risiko agribisnis. Selain itu SRG hadir di Indonesia bertujuan untuk membantu petani dalam mengatasi permasalahan mengenai pembiayaan usaha tani dan antisipasi terhadap harga rendah pada musim panen. Dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah dan kendala yang ditemui sehingga perlu adanya pembahasan mengenai upaya dan tindakan pemerintah dan para *stakeholders* untuk mengembangkan SRG di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya dan tindakan dalam mengatasi masalah dan kendala Sistem Resi Gudang di Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain, dan ditabulasikan ke dalam narasi secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 masalah dan 6 kendala yang masing-masing memiliki upaya dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan para *stakeholders* SRG. SRG merupakan barang baru baru di Indonesia sehingga perlu sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga pendukung lainnya agar sistem ini berkembang pesat di Indonesia.

Kata kunci : Masalah dan kendala; upaya dan tindakan; Sistem Resi Gudang (SRG)

Abstract

Warehouse Receipt System (WRS) is one solution in agribusiness risk management. In addition, WRS is present in Indonesia with the aim of assisting farmers in overcoming problems regarding farming financing and anticipating low prices during the harvest season. In its implementation, there are still problems and obstacles encountered, so there needs to be a discussion on the efforts and actions of the government and stakeholders to develop WRS in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the efforts and actions in overcoming the problems and constraints of the Warehouse Receipt System in Indonesia. The data collection method in this study utilized data or documents produced by other parties, and was tabulated into a descriptive qualitative narrative. The results of the study showed that there were 3 problems and 6 constraints, each which has efforts and actions that can be taken by the government and WRS stakeholders. WRS is a new production in Indonesia, so it needs synergy between the central government, regional governments, and other supporting institutions so this system can develop rapidly in Indonesia.

Keywords : problems and obstacles; efforts and actions; Warehouse Receipt System (WRS)

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan pada tahun 2006 menciptakan salah satu alternatif solusi bagi petani mengenai pembiayaan usahatani serta membantu dalam permodalan. Solusi ini juga dapat meminimalisir risiko adanya kegagalan panen. Solusi tersebut adalah Sistem Resi Gudang (SRG). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sedangkan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang tertentu yang harus mendapatkan persetujuan yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Secara umum penerapan SRG mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan posisi tawar petani, memotivasi petani untuk berproduksi lebih tinggi dan menjaga kualitas, meningkatkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan, membuka wawasan dan keterampilan petani terkait teknologi informasi, dan mengurangi intervensi pemerintah dalam mengatur perdagangan komoditas pertanian (Coulter dan Onumah, 2002). Namun pada kenyataannya, SRG baru terdapat di 26 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Sampai akhir 2020 jumlah gudang SRG terdiri dari 123 gudang milik Kementerian Perdagangan dan 83 gudang milik swasta. 83 gudang milik swasta terbagi menjadi 26 gudang aktif dan 57 gudang tidak aktif. Sedangkan milik pemerintah terbagi menjadi sebagai berikut :



Gambar 1. Sebaran gudang SRG milik Kementerian Perdagangan

Dari sebaran diatas, dapat terbilang SRG merupakan “barang” baru di Indonesia. Minimnya implementasi SRG menimbulkan banyak masalah dan kendala yang terjadi sehingga hal ini mungkin harus dipandang sebagai “pekerjaan rumah” bagi semua pihak yang *concern* dalam masalah ini. Padahal salah satu maksud dari sistem ini adalah sebagai sarana membantu petani untuk bisa menekan kerugian pada saat harga komoditas sedang turun dengan cara menyimpannya didalam gudang yang bersertifikat. Selain itu, petani dapat menjaminkan dokumen tersebut untuk mendapatkan pembiayaan usaha tani berikutnya. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya dan tindakan dalam mengatasi masalah dan kendala Sistem Resi Gudang di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sekunder (analisis data sekunder). Penelitian ini mempergunakan atau memanfaatkan data yang sudah ada, umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis, data hasil penelitian, dan dapat pula berupa dokumenter administratif kelembagaan, baik yang dipublikasikan dan yang tidak. Heaton (2004) menunjukkan bahwa analisis

data sekunder adalah cara yang efektif untuk menganalisis data ketika ada kesulitan mengakses sampel yang sulit dijangkau, dan ketika berhadapan dengan masalah yang sangat sensitif, populasi kecil, dan fenomena langka. Data-data yang didapat akan diteliti secara mendalam menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Hasil dan Pembahasan

Masalah dan Kendala Sistem Resi Gudang

Masalah SRG adalah kondisi belum tercapainya rencana/target dari yang sudah ditentukan. Hasil penelusuran data sekunder ditemukan bahwa pelaksanaan SRG berjalan relatif lambat. Berikut beberapa masalah dan kendala yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang didapat :

Tabel 1. Masalah Sistem Resi Gudang

Tahun	Sumber	Masalah
2021	Bappebti	SRG belum merata di 34 provinsi di Indonesia (baru ada di 26 provinsi)
2017	Journal of Agribusiness and Rural Development Research	Tidak adanya kesinambungan mitra usaha
2018	Journal Research and Analysis	
2016	Jurnal Sosiohumaniora	Kebijakan pemerintah yang saling bertentangan

Tabel 2. Kendala Sistem Resi Gudang

Tahun	Sumber	Kendala
2012	Forum Penelitian Agro Ekonomi	
2013	Bulletin Ilmiah Litbang Perdagangan	
2014	Analisis Kebijakan Pertanian	Kurang SDM untuk memberikan sosialisasi & penyuluhan
2015	Analisis Kebijakan Pertanian	
2016	Universitas Lampung	
2017	Journal of Agribusiness and Rural Development Research	
2019	Institut Pertanian Bogor	
2020	Scientia : Jurnal Hasil Penelitian	
2013	Bulletin Ilmiah Litbang Perdagangan	Fasilitas gudang yang kurang memadai
2014	Analisis Kebijakan Pertanian	
2015	Analisis Kebijakan Pertanian	
2014	Analisis Kebijakan Pertanian	Penyediaan LPK yang belum merata
2013	Jurnal Bina Praja	Kurang partisipasi perbankan
2016	Universitas Lampung	
2014	Analisis Kebijakan Pertanian	Potensi terjadinya <i>Non Performing Loan</i> (NPL)
2013	Bulletin Ilmiah Litbang Perdagangan	Rendahnya hasil produksi petani
2016	Institut Pertanian Bogor	
2017	Journal of Agribusiness and Rural Development Research	
2019	Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)	

Upaya dan Tindakan untuk Mengembangkan Sistem Resi Gudang di Indonesia

Berdasarkan perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia yang masih rendah dengan beberapa kendala dan masalah yang dihadapi, maka pemerintah dan para *stakeholders* harus menentukan upaya dan tindakan yang bertujuan untuk mengembangkan sistem ini. Adapun upaya dan tindakan pemerintah dan para *stakeholders* untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Upaya dan tindakan berdasarkan masalah yang ada

Masalah	Penanggung Jawab	Upaya Dan Tindakan
SRG masih belum merata di 34 Provinsi	Pemerintah pusat (Kemendag, Bappebti), Pemerintah daerah (Dinas perdagangan)	Pemerataan SRG dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pengaturan kontrak
Tidak adanya kesinambungan mitra usaha	Pengelola gudang dengan Bappebti	Kerjasama dengan jangka waktu yang panjang dan saling menguntungkan
Kebijakan pemerintah yang saling bertentangan	Pemerintah pusat (Kemendag, Kementan)	Melakukan kerjasama antara kebijakan Kemendag dengan Kementan

1. Pemerataan Sistem Resi Gudang

Pemerataan Sistem Resi Gudang di Indonesia dapat dilakukan dengan cara komitmen untuk bekerjasama diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Komitmen ini bukan hanya secara lisan, tetapi juga tertulis melalui surat keputusan. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pengalihan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), pemanfaatan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Contohnya pada gudang SRG di Wonogiri, Jawa Tengah yang pembangunannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2011 dan pada tahun 2018 menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Wonogiri. Menurut Wakil Kementerian Perdagangan Jerry Sambuaga, Jawa Tengah merupakan wilayah potensial sebagai provinsi yang mengimplementasikan SRG dikarenakan wilayah tersebut merupakan salah satu sentra produksi dengan banyak komoditas. Hingga Maret 2021, Kementerian Perdagangan telah memberi bantuan 15 gudang SRG beserta fasilitasnya yang tersebar di Wonogiri, Grobogan, Kebumen, Demak (2 gudang), Pekalongan, Jepara, Cilacap, Purworejo, Brebes, Kudus (2 gudang), Blora, Banjarnegara, dan Pemalang (Bappebti, 2021).

2. Pengaturan Kontrak Kerjasama

Bappebti memberikan penilaian rencana usaha selama 3 tahun kepada calon pengelola gudang. Penilaian rencana usaha ini juga melibatkan Lembaga OSS (*Online Single Submission*). Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal. Bappebti dan Lembaga OSS menilai calon pengelola gudang selama 3 tahun tersebut apakah memenuhi persyaratan komitmen dan SLA (*Service Level Agreement*) penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan. Apabila dalam penilaian tersebut calon pengelola gudang tidak memenuhi persyaratan, maka Bappebti berhak mengeluarkan sanksi administrasi (Peraturan Kepala Bappebti, 2018). Salah satu badan usaha yang telah memutuskan kontrak kerjasama dengan Bappebti adalah PT. Pertani. Sejak tahun 2014, PT. Pertani memutuskan untuk tidak lagi membangun kerjasama dikarenakan tidak adanya keuntungan di pihak mereka. Padahal PT. Pertani telah menjadi pengelola gudang semenjak SRG ini berdiri. Keputusan ini berdampak pada gudang-gudang yang ditinggal, sehingga beberapa darinya ada yang beralih fungsi manajemen dan ada juga yang dimanfaatkan oleh petani sekitar untuk menipkan hasil pertaniannya sementara.

Cara mengatasi permasalahan yang seperti ini adalah dengan mengubah pengaturan kesepakatan MoU dan kontrak kerjasama didalamnya. Perubahan ini bisa mengubah lama waktu kerjasama yang awalnya 3 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu isi dari kesepakatan tersebut lebih diperjelas, sehingga calon pengelola gudang yakin akan sistem ini dan senantiasa meneruskan untuk menjadi mitra usaha. Pendampingan pengelola gudang juga perlu dilakukan dari pihak Bappebti, Kemendag, maupun lembaga penjaminan (Perum Jamkrindo).

3. Kerjasama antar Kebijakan

Kebijakan Perum Bulog dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan SRG dimasa mendatang. Hal ini dikarenakan kebijakan Perum Bulog yang membeli gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dapat merubah sikap petani yang akan menunda jual hasil pertaniannya.

Kerjasama antar pembuat kebijakan yakni Kemendag dengan Kementan sangat efektif untuk menghindari sikap petani yang bimbang. Menurut Rizki (2021), Kementerian Pertanian dalam Webinar INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*) ada 4 cara dalam menunjang keberlanjutan Sistem Resi Gudang, salah satunya adalah dengan adanya *off taker*. *Off taker* atau penjamin komoditas adalah orang atau sekelompok orang yang dapat menjamin komoditas hasil pertanian. Perum Bulog dapat bertindak sebagai *off taker* untuk komoditas gabah dan beras. Bulog dapat membeli gabah dan beras dari gudang SRG yang bertujuan untuk pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras. Sehingga nantinya tidak terjadi fluktuasi harga dikarenakan pengendalian harga sudah diatur oleh sentral, yakni Bulog. Menjadikan Bulog sebagai *off taker* SRG perlu adanya pembicaraan lebih lanjut agar dapat terintegrasi dengan baik. Tidak hanya Bulog yang dapat menjadi *off taker*, BUMN juga dapat menjadi *off taker* Sistem Resi Gudang.

Tabel 4. Upaya dan tindakan berdasarkan kendala yang ada

Kendala	Penanggung Jawab	Upaya Dan Tindakan
Kurangnya SDM untuk memberikan LES (Literasi, Edukasi, Sosialisasi)	Pemerintah pusat (Kemendag, Bappebti, Kementan, Kemenko, Kemenkop & koperasi), pemerintah daerah (dinas perdagangan, pertanian, koperasi), dan pengelola gudang	Perekrutan SDM yang berkompeten dan tidak melakukan mutasi pegawai dengan cepat
Fasilitas gudang yang kurang memadai	Pemerintah pusat (kemendag, Bappebti) dan pemerintah daerah (dinas perdagangan)	Penambahan teknologi yang sesuai dengan komoditas yang disimpan
Penyediaan LPK yang belum merata	Pemerintah pusat (kemendag, Bappebti)	Pemerataan LPK dengan menjalin kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah
Kurangnya partisipasi perbankan	Pemerintah pusat (Kemendag, Bappebti) dan perbankan	Penambahan partisipasi perbankan
Potensi Terjadinya Non Performing Loan (NPL)	Pemerintah pusat (kemenko, Bappebti) dan lembaga keuangan	Adanya kepastian jaringan pemasaran
Rendahnya hasil produksi petani	Pemerintah pusat (Kemendag, Bappebti, Kementan, Kemenko, Kemenkop & koperasi), pemerintah daerah (dinas perdagangan, pertanian, koperasi), pengelola gudang, dan petani	Pemberian subsidiserta pendampingan

1. Perekrutan SDM yang Berkompeten

Komoditas dalam SRG sebagian besar masih terbatas gabah dan beras dikarenakan teknologi penyimpanan kedua komoditas tersebut relatif lebih sederhana dan murah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu memfasilitasi pengelola gudang terkait peningkatan kemampuan untuk menguasai teknologi penyimpanan barang non gabah/beras. Kegiatan pelatihan ke pengelola gudang dan *stakeholder* terkait, merupakan strategi alternatif untuk meningkatkan kemampuan para pelaku SRG (Suryani, 2014). Menyikapi hal tersebut, Bappebti selaku badan pengawas SRG terus melakukan literasi, edukasi, serta sosialisasi (LES) terkait SRG kepada masyarakat. Mulai dari pembuatan pamflet, sosialisasi ke universitas, hingga mengadakan seminar. Selain perekrutan atau penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dengan LES, tidak melakukan mutasi pegawai dengan cepat juga merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kendala kurangnya sumber daya manusia. Tidak hanya perekrutan SDM yang berkompeten, adanya pelatihan tentang Sistem Resi Gudang juga perlu ditingkatkan.

Webinar INDEF (*Institute For Development of Economics and Finance*) yang dilaksanakan pada 25 Mei 2021 secara *online* dengan tema “Reaktualisasi Sistem Resi Gudang” merupakan contoh upaya Bappebti yang selalu mengenalkan SRG kepada masyarakat. Harapan dari pelatihan ini adalah peran serta dukungan semua pihak dalam kelembagaan SRG dapat memahami semua materi yang diberikan sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong berkembangnya SRG kedepan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT. Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Wibhiyadi melalui keterangan tertulisnya kepada media (Rizki, 2021). Sosialisasi kepada petani juga perlu dilaksanakan dan ditingkatkan, karena pada dasarnya *stakeholder* utama dalam sistem ini adalah petani. Dalam mengajak petani untuk ikut serta dalam sistem ini adalah dengan mendatangi secara aktif ke rumah petani secara langsung (*door to door*) untuk menciptakan kedekatan dan pemahaman yang menyeluruh mengenai SRG. Selain datang secara langsung, dalam penyampaian materi sebisa mungkin untuk

menyederhanakan bahasa dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh petani. (Masithoh, 2016).

2. Penambahan Fasilitas Sesuai dengan Komoditas yang Disimpan

Penambahan gudang saja tidak cukup untuk perkembangan SRG di Indonesia, harus dibarengi dengan pemberian teknologi yang dibutuhkan. Pemberian teknologi menggunakan pengalihan anggaran APBN, APBD, maupun DAK merupakan langkah yang baik. Contohnya seperti penambahan alat *dryer* dan RMU (*Rice Milling Unit*) pada SRG Wonogiri sejak 2018 lalu. Penambahan alat ini dibutuhkan sebagai upaya untuk membantu petani mendapatkan nilai tambah dari kegiatan SRG tersebut. Dari penambahan alat tersebut, SRG Wonogiri mampu memproduksi beras sendiri dan telah mendistribusikan “Beras ASN Wonogiri” sebagai penguatan program PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) (Bappebti, 2021). Contoh lainnya seperti PT. Bhandha Ghara Rekha yang memberikan bantuan alat sortir lada kepada gudang SRG Puding Kabupaten Bangka dan Mangkol Kabupaten Bangka Tengah. Pemberian alat sortir lada ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lada Muthok White Pepper serta mendukung perindustrian di wilayah tersebut (Saliem, 2021).

3. Pemerataan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

LPK yang sudah terdaftar di Bappebti baru sebanyak 37 perusahaan dan berada di 29 provinsi yang tersebar di 72 kabupaten/kota. Penyediaan LPK yang belum merata menyebabkan beberapa pengelola gudang menguji komoditasnya di daerah lain sehingga menimbulkan biaya uji mutu yang lebih tinggi. Padahal peran LPK sangat penting untuk menentukan kualitas komoditas yang akan disimpan dalam gudang SRG. Pemerataan LPK dapat dilakukan dengan penambahan UPTD BPSMB (Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang) di daerah-daerah yang sudah melaksanakan SRG. Dapat pula menjadikan pengelola gudang sekaligus lembaga penilaian untuk mempercepat penerbitan resi gudang. Hal ini diungkapkan juga oleh Bappebti

(2019), pihaknya juga mendorong pengelola gudang untuk menjadi lembaga penguji mutu komoditas melalui program pelatihan dan pendampingan.

4. Penambahan Partisipasi Perbankan

Peningkatan LES (literasi, edukasi, sosialisasi) dilakukan secara *kontinu* kepada pihak perbankan dan dengan menunjukkan bukti nyata bahwa resi gudang merupakan lembaga jaminan yang dapat melindungi kepentingan perbankan sebagai kreditur (Riana, 2010). Pemberian LES dapat disertai dengan *success stories* dari beberapa bank yang sudah melaksanakan, contohnya pada Bank BJB. Bank BJB yang mulai menyalurkan kredit sejak tahun 2010 hingga September 2020 dan mampu menyalurkan kredit dengan skema subsidi resi gudang (S-SRG) yang hampir mencapai Rp178 miliar untuk 1.612 petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi (Bappebti, 2020).

5. Adanya Kepastian Jaringan Pemasaran

Non Performing Loan (NPL) adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan di awal (Ismail, 2010). Potensi NPL muncul ketika barang (komoditas) di gudang yang belum terjual saat jatuh tempo. Cara mengatasi NPL adalah dengan memasarkan barang yang disimpan sebelum waktu jatuh tempo. Penggunaan Pasar Lelang Komoditas (PLK) menjadi hal yang bagus untuk meminimalisir terjadinya NPL. Kepala Bappebti, Sidharta Utama mengungkapkan bahwa 3 pilar utama perdagangan komoditas yakni Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Menurut Bappebti (2021), PBK mempunyai peran sebagai sarana pengelolaan risiko melalui kegiatan lindung nilai, sebagai sarana pembentukan harga yang wajar dan transparan serta alternatif investasi bagi pelaku usaha. Sedangkan PLK dapat meningkatkan daya saing petani/produsen, menciptakan intensif bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat.

6. Pemberian Subsidi serta Pendampingan

Rendahnya hasil produksi petani berdampak pada banyaknya volume penyimpanan dalam gudang. Hasil produksi yang tidak sesuai dengan batas minimum penyimpanan tidak dapat disimpan dalam gudang SRG. Hal ini merupakan salah satu persyaratan yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 pasal 3 ayat (1) tentang barang dan persyaratan barang yang disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Sehingga perkembangan SRG cenderung lambat dikarenakan banyak petani yang ragu akan syarat kuantitas barang tersebut. Didalam teori ekonomi dijelaskan bahwa berproduksi sedikit maka cenderung akan lebih rugi karena tidak mencapai *economies of scale* (Fitrianasari, 2018). Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melakukan tunda jual di gudang SRG dikarenakan prasyarat tadi. Fitrianasari (2018) menyatakan bahwa peluang petani dalam mengakses SRG adalah luas lahan yang dimiliki petani. Semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin tinggi peluang untuk mengakses SRG. Oleh karena itu, pembentukan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani sangat membantu para petani berlahan sempit untuk dapat mengakses program ini.

Penguatan ini tentunya perlu pendampingan dari pengelola gudang secara aktif agar tersinergi dengan baik. Oleh sebab itu, Bappebti selaku badan pengawas SRG terus melakukan LES serta pendampingan kepada *stakeholder* SRG. Selain pendampingan, pemberian subsidi dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah juga dapat mensukseskan sistem ini. Subsidi yang diberikan bisa diambil dari anggaran APBN atau APBD dan mengalokasikannya tepat sasaran.

Kesimpulan

Upaya dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dan para *stakeholders* Sistem Resi Gudang adalah dengan pemerataan kelembagaan dalam SRG di wilayah yang belum terdapat sistem ini serta pemberian fasilitas yang mendukung dengan pengaturan anggaran APBN dan APBD. Disamping itu terus melakukan LES (Literasi, Edukasi, dan Sosialisasi) baik kepada

petani/poktan/gapoktan, koperasi, maupun kepada lembaga pendukung SRG lainnya. Dan tidak lupa sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena apabila tidak ada sinergitas diantara keduanya maka sistem ini tidak akan berjalan dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Bappebti. 2018. *Annual Report Bappebti 2018 Laporan Tahunan*. Jakarta (ID) : Bappebti.
- Bappebti. 2019. *Langkah Penyiapan Pelaksanaan SRG*. [Booklet]
- Bappebti. 2020. *Apresiasi Untuk Pengelola SRG Terbaik*. Buletin Perdagangan Berjangka Edisi 213 Bulan Januari 2020.
- Bappebti. 2021. *Strategi Pengembangan Gudang SRG di Kabupaten Wonogiri*. [Bahan Literasi Bappebti].
- Bappebti. 2021. *Urgensi Akselerasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang di Indonesia*. [Bahan Literasi Bappebti].
- Coulter J. and Onumah G. 2002. *The Role of Warehouse Receipt System in Enhanced Commodity Marketing and Rural Livelihoods in Africa*. Food Policy.
- Fitrianasari, Erika Kartika. 2018. “Akses Petani Padi Terhadap Sistem Resi Gudang dan Dampaknya pada Pendapatan Petani di Tasikmalaya”. *Skripsi*. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
- Haryotejo, Bagas. 2013. “Analisis Korelasi Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Resi Gudang di Daerah”. *Jurnal Bina Praja*. Vol. 5(2): 91-100.
- Heaton. 2004. *Reworking Qualitative Data*. London : Sage Publications Limited.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana
- Masithoh, Dewi. 2016. “Biaya Transaksi Sistem Resi Gudang Gabah”. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Riana, Dina. 2010. “Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia”. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Rizki. 2021. *KBI dan Bappebti Gelar Pelatihan Calon Pengelola Gudang SRG*. Berita Elektronik Neo-Demokrasi.com. dalam <https://www.neo-demokrasi.com/kbi-dan-bappebti-gelar-pelatihan-calon-pengelola-gudang-srg/> diakses 15 Februari 2022.

- Saliem, Novian Miftachul. 2021. *Tingkatkan Mutu dan Kualitas Lada, BGR Logistics Bersama Pemprov Babel Berikan Bantuan Alat Sortir Lada*. [BGR Logistics NEWS].
<https://www.bgrlogistics.id/id/publikasi/berita/Berita/Tingkatkan%20Mutu%20dan%20Kualitas%20Lada,%20BGR%20Logistics%20Bersama%20Pemprov%20Babel%20Berikan%20Bantuan%20Alat%20Sortir%20Lada>
diakses 19 Februari 2022
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suryani, E., Erwidodo dan Iwan S.A. 2014. “Sistem Resi Gudang di Indonesia : Antara Harapan dan Kenyataan”. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 12(1) : 69 - 86.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.